

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Yusnadi

Abstrak

Komunikasi pembangunan pada dasarnya merupakan instrument perekat dalam pembangunan karakter bangsa, terutama pada masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural pada dasarnya dapat menjadi potensi yang amat kuat dalam pembangunan, sebaliknya dapat menjadi penghambat apabila tidak dikelola secara baik dan benar. Oleh karenanya, komunikasi pembangunan dalam membangun karakter bangsa harus berbasis pada masyarakat multicultural. Bangsa yang berperadaban dan bermoral adalah merupakan karakteristik bangsa yang dituju dan dicita-citakan. Karakter bangsa yang demikian hanya dapat dicapai apabila instrument perekat utama dapat berfungsi secara maksimal.

Kata Kunci: komunikasi pembangunan, karakter bangsa, masyarakat multikultural

Pendahuluan

Komunikasi pembangunan dan masyarakat multicultural itu memiliki hubungan timbal balik (reciprocal relationship). Maknanya, bila pada satu sisi komunikasi pembangunan memiliki peran signifikan guna membangun masyarakat multicultural, disisi lain masyarakat multicultural dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan untuk memberhasilkn fungsi dan peran komunikasi pembangunan pada umumnya.

Itu berarti, penguatan disatu sisi, langsung atau tidak langsung, akan memberi penguatan pada sisi lain. Penguatan terhadap komunikasi pembangunan, misalnya dengan memperbaiki system dan mengefektifkan kegiatan komunikasi pembangunan, akan menambah keberhasilan dalam membangun masyarakat multicultural, yaitu dengan mengelola potensi yang dimiliki secara benar, akan menambah keberhasilan fungsi dan peran komunikasi pembangunan umumnya. Implikasinya, dengan dilakukannya penguatan pada kedua sisi secara simultan akan memberi hasil optimal, baik dari sisi peran komunikasi pembangunan maupun pembangunan karakter bangsa berbasis masyarakat multicultural itu sendiri.

Komunikasi Pembangunan Berbasis Budaya

Komunikasi pembangunan merupakan salah satu instrument yang dapat dijadikan sebagai lem perekat untuk mempersatukan masyarakat plural menjadi satu masyarakat yang memiliki satu pandangan, satu kerangka untuk membangun masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat berbudaya menuju pembangunan nation state, yaitu masyarakat yang berperadaban dan bermoral.

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk social manusia selalu ingin bergaul atau bersama-sama dengan orang lain tanpa memandang perbedaan latar belakang social budaya. Dalam kerangka meningkatkan kehidupan bersama tersebut mereka perlu berkomunikasi satu sama lain dengan menciptakan, memelihara relasi melalui pembagian informasi bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kaitan ini Watzlawick, Beavin dan Jackson, (1967) mengatakan, komunikasi setidaknya sampai batas tertentu, berkaitan dengan dunia nyata atau sesuatu yang berada di luar pembicara dan pendengar. Tetapi, sekaligus, komunikasi juga menyangkut hubungan di antara kedua pihak.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural (majemuk) dan bersifat multidimensi sebagai akibat dari perbedaan etnis, budaya, bahasa, agama, tingkatan social, pengelompokan organisasi politik dan lain-lain. Tidak dapat dinafikan bahwa mereka tunggal dalam satu wilayah lingkungan, dan karenanya mereka saling berinteraksi. Dalam interaksi berbagai kelompok masyarakat, kemajemukan sebagaimana melahirkan integrasi sebagaimana juga bias melahirkan konflik. Dalam perjalanan pembangunan, dibutuhkan lem perekat yang dapat memobilisasi semangat persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan daya saing sekaligus sebagai upaya untuk mengeliminir perbedaan.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, dan kebiasaan di dalamnya. Disisi lain, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multicultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (cultural background) beragam. Kemajemukan multiculturalitas mengisyaratkan adanya perbedaan. Bila dikelola benar, kemajemukan dan multikulturalitas menghasilkan tenaga hebat yang luar

biasa. Sebaliknya, apabila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas dapat menimbulkan bencana teramat dahsyat.

Secara umum, menurut Liliweri (2004) ada empat kategori fungsi utama komunikasi, yaitu: (1) fungsi informasi, (2) fungsi instruksi, (3) persuasive, dan (4) fungsi hiburan. Lebih lanjut dinyatakan, apabila empat fungsi utama tersebut diperluas maka akan ditemukan dua fungsi lainnya, yaitu fungsi social dan dan fungsi pribadi. Fungsi pribadi komunikasi mencakup fungsi menyatakan identitas social, fungsi integrasi social, fungsi kognitif, dan fungsi melepaskan diri/jalan keluar. Sementara fungsi social terdiri dari fungsi pengawasan, fungsi menghubungkan, fungsi sosialisasi, dan fungsi menghibur.

Dalam konteks komunikasi pembangunan, kemajemukan bangsa dan multikulturalitas masyarakat Indonesia merupakan potensi yang hebat bila dikelola secara benar. Sebaliknya, kemajemukan bangsa dan multikulturalitas masyarakat Indonesia merupakan potensi yang jahat bila tidak bisa dikelola secara benar.

Setiap komunitas dengan latar budaya tertentu pasti memiliki local genius yang berupa nilai-nilai positif dan negatif. Nilai positif dan negatif ini bila dishare dengan komunitas lain, secara mutualistik akan menghasilkan daya yang jauh lebih produktif dari semula. Ini merupakan potensi masyarakat multikultural yang dapat dikembangkan untuk memberhasilkan peran komunikasi pembangunan dalam pembangunan masyarakat berdimensi masyarakat multikultural. Kenyataan seperti itu sering dilupakan para komunikator pembangunan. Perbedaan lebih dapat dilihat sebagai sumber perpecahan, bukan potensi untuk berprestasi.

Padahal, secara empiris telah terbukti bahwa local genius yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat telah memberhasilkan fungsi dan peran komunikasi pembangunan, misalnya dengan mengambil nilai-nilai positif yang diyakini kelompok masyarakat akan memudahkan komunikator pembangunan dalam menanamkan sikap positif pada audien (komunikan). Demikian juga dengan mengambil nilai-nilai filosofis yang diyakini kelompok masyarakat tertentu dapat memperlancar tugas komunikator pembangunan dalam mengembangkan aspek afektif dari komunikan.

Komunikasi Pembangunan dalam Pembangunan Karakter Bangsa pada Masyarakat Multikultural

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural (majemuk) dan bersifat multidimensi sebagai akibat dari perbedaan etnis, budaya, bahasa, agama, tingkatan social, pengelompokan organisasi politik dan lain-lain. Tidak dapat dinafikan bahwa mereka tunggal dalam satu wilayah lingkungan, dan karenanya mereka saling berinteraksi. Dalam interaksi berbagai kelompok masyarakat, kemajemukan bisa melahirkan integrasi sebagaimana juga bisa melahirkan konflik. Dalam perjalanan pembangunan, dibutuhkan lem perekat yang dapat memobilisasi semangat persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan daya saing sekaligus sebagai upaya untuk mengeliminir perbedaan.

Komunikasi pembangunan merupakan salah satu instrument yang dapat dijadikan sebagai lem perekat untuk mempersatukan masyarakat plural menjadi satu masyarakat yang memiliki satu pandangan, satu kerangka untuk membangun masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat berbudaya menuju pembangunan nation state, yaitu masyarakat yang berperadaban dan bermoral.

Kebijakan pembangunan yang dirancang dalam tatanan masyarakat egaliter, demokratis, beriman dan beretika pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang positif antara kehidupan masyarakat berperadaban dan bermoral yang diharapkan dengan proses pembangunan yang dijalankan. Cita-cita masyarakat berperadaban dan bermoral demikian signifikan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Karena melalui wujud masyarakat berperadaban dan bermoral, manusia yang berilmu pengetahuan, berakhlak dan beragama dapat diciptakan sebagai syarat untuk keberlangsungan pembangunan yang berkesinambungan yang mutlak memerlukan komunikasi pembangunan berbasis multikultural.

Dalam konteks membangun masyarakat multikultural, selain berperan membangun karakter bangsa agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain, komunikasi pembangunan juga berperan memberi perekat antara berbagai perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok masyarakat yang memiliki latar budaya berbeda agar lebih meningkat komitmennya dalam berbangsa dan bernegara.

Jenis perekat yang dipakai ialah pembangunan karakter dan semangat kebangsaan (*nation and character building/NCB*). Dalam kaitan ini, karakter kebangsaan merupakan pengembangan jati diri bangsa Indonesia yang (pernah) dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, toleran, dan sejenisnya. Sementara semangat kebangsaan adalah keinginan yang amat mendasar dari setiap komponen masyarakat untuk bangsa. Karakter dan semangat kebangsaan seperti itu akan berkembang, baik secara natural maupun kultural, menuju tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks *nation character building*, bangsa itu adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Persatuan dan kesatuan merupakan konsekuensi logis pengembangan jati diri dan keinginan mendasar untuk berbangsa.

Dalam konteks NCB, tiap komponen bangsa memiliki kedudukan, hak dan kewajiban sama. Etnis Melayu memiliki kedudukan yang sama dengan etnis Cina dan etnis-etnis lain; suku Aceh memiliki hak yang sama dengan suku Sunda dan suku-suku lain; demikian juga pemeluk agama Islam mempunyai kewajiban yang sama dengan pemeluk agama Katolik dan agama-agama lain dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semua komponen bangsa mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan bangsa.

Khusus dalam aspek *nation building* kelihatannya perlu dibenahi dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Banyak generasi muda saat ini asing dengan sejarah nasional, padahal sejarah nasional sarat muatan kebangsaan, baik nilai maupun pesan, untuk senantiasa berdisiplin dalam berbangsa. Itulah sebabnya, semangat kebangsaan perlu dikebangkan terus. Bagaimana dengan *character building*? Sepertinya tidak banyak berbeda. Munculnya banyak kasus yang destruktif dalam konteks kebangsaan, misalnya terjadinya sentimen antar etnis, perselisihan antar suku, sampai perang antar pemeluk agama, menunjukkan karakter kebangsaan Indonesia saat ini lemah. Karakter kebangsaan ini harus selalu dipupuk dan disirami agar dapat tumbuh dengan baik dan subur.

Pengembangan karakter kebangsaan itu tidak sekedar untuk menjadikan anggota masyarakat multikultural Indonesia dapat berperilaku baik, santun, ramah, tetapi lebih dari itu dapat memupuk jiwa yang senantiasa berdisiplin dalam berbangsa. Perilaku baik, santun, ramah adalah nilai-nilai konstruktif dalam kehidupan, tetapi belum begitu bermakna dalam konteks semangat kebangsaan.

Jadi, karakter yang dibangun tidak hanya *character for the individual well being*, tetapi lebih dari itu, *character for the national well being* yang diperlukan untuk mengembangkan semangat kebangsaan. Dari sisi moral, yang dikembangkan tidak sekedar *individual morality* akan tetapi sampai kepada *social morality*.

Kebijakan pembangunan yang dirancang dalam tatanan masyarakat egaliter, demokratis, beriman dan beretika pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang positif antara kehidupan masyarakat berperadaban dan bermoral yang diharapkan dengan proses pembangunan yang dijalankan. Cita-cita masyarakat berperadaban dan bermoral demikian signifikan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Karena melalui wujud masyarakat berperadaban dan bermoral, manusia yang berilmu pengetahuan, berakhlak dan beragama dapat diciptakan sebagai syarat untuk keberlangsungan pembangunan yang berkesinambungan itu diperlukan komunikasi pembangunan berbasis pada masyarakat multikultural..

Komunikasi Pembangunan dalam Pembangunan Karakter Bangsa: Menuju Masyarakat Berperadaban dan Bermoral

Civil society, adalah gambaran masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat berperadaban dan berbudaya. Culla (1999) mengatakan, civil society itu sendiri mengalami evolusi jangka panjang. Sebagaimana mana yang dimaksud oleh Cicero, seorang pemikir politik Romawi yang pertama kali mencetuskan ide *societas civilis* (masyarakat berperadaban). Dengan demikian, civil society (masyarakat madani) pada hakikatnya adalah masyarakat yang telah memiliki peradaban, sebagaimana berkembang dalam masyarakat atau negara. Di luar konsep itu adalah masyarakat barbar yang dianggap tidak memiliki peradaban. Secara lebih khusus peradaban itu adalah tata hukum yang menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara (Madjid, 1999).

Dalam sejarah Islam, kosep negara seperti itu pernah ada dalam tatanan negara-kota Madinah sebagaimana dikembangkan oleh orientalis, Montgomery Watt (1967) menyebutnya dengan istilah Konstitusi Madinah, yakni masyarakat yang pluralis. Dalam konstitusi ini diperoleh rumusan mengenai prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslim dengan berbagai kelompok non muslim di

Madinah, di bawah pimpinan Rasulullah SAW untuk tujuan membangun masyarakat politik secara bersama. Prinsip-prinsip konstitusi Madinah yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian adalah berkaitan dengan egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras dan sebagainya), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan (Madjid, 1999).

Seterusnya, negara-kota itu berkembang menjadi negara bangsa dan negara multi-etnik, multi-nasional dan multi-budaya, yang dihadapkan pada masyarakat jahiliyah yang belum menjalankan syariat Islam atau tidak tercakup dalam konstitusi Madinah. Di lingkungan Kristen Eropah pada abad pertengahan, muncul istilah *civitas dei* yang mirip dengan konsep masyarakat beriman. Sebagaimana yang berlaku di kawasan imperium Islam, *civitas dei* dalam masyarakat Kristen Eropah merupakan bagian dari masyarakat feodal (Rahardjo, 2001).

Dalam rangka memperkaya makna dan penyempurnaan konsep masyarakat madani serta untuk mengkontekstualkan dan mengefektifkan pembentukannya dalam konteks historis dan geografis, termasuk di Indonesia, maka penggalian elemen dasar masyarakat berperadaban dan berbudaya dari berbagai perspektif, tradisi pemikiran, aliran filsafat, agama atau pengalaman praktik kemasyarakatan lain, tidak bisa dielakkan. Salah satunya adalah menggali elemen nilai-nilai Islam yang secara demografis merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Islam memiliki doktrinal yang cukup kuat dalam mempengaruhi dan menggerakkan perilaku para pemeluknya.

Pembangunan adalah gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan serta pembangunan karakter bangsa. Pembangunan dengan demikian merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan kearah perbaikan itu memerlukan pengarah dari seluruh budidaya manusia untuk mewujudkan cita-citanya.

Penutup

Komunikasi pembangunan pada hakikatnya sebagai instrumen perekat utama dalam pembangunan masyarakat. Instrumen tersebut semakin kuat dayagunanya manakala dihadapkan dengan pembangunan masyarakat berbasis multikultural, seperti bangsa Indonesia. Pembangunan karakter bangsa yang dicirikan sebagai masyarakat berbudaya dan bermoral sesungguhnya merupakan cita-cita ideal dari pendiri bangsa ini. Cita-cita ideal tersebut tidak pernah akan terwujud apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan dan komitmen dari setiap komponen bangsa untuk mewujudkannya. Upaya memperkuat komitmen untuk membangun bangsa berkarakter memerlukan instrumen tertentu, yang salah satu diantaranya melalui komunikasi pembangunan.

Bibliografi

- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita reformasi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Liliweri, A. 2004. *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*. Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Madjid, Nurcholis, 1999. *Cita-cita Politik Islam Era reformasi*. Paramida, Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 2001. *Civil Society di Indonesia*. Makalah pada Workshop for Lecturers on civic Education diselenggarakan oleh ICCE IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bogor: 6-18 Agustus 2001.
- Watzlawick, Paul, Janet Helmick Beavin, and Don D. Jackson . 1967. *Pragmatics of Human Communications: A Study of International Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. New Yorks.